# PENGADILAN TINGGI BANTEN LAPORAN KEUANGAN

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018** 

Jl. Raya Pandeglang KM 6,6

Serang - Banten 421161

Telp. (0254)250002 Fax. (0254)250001

e-mail: ptbanten\_judge@yahoo.co.id



# LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI BANTEN

## Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.03

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Pandeglang KM 6,6
Telp. (0254)250002 Fax. (0254)250001
Serang - Banten 421161

 $e\hbox{-}mail:ptbanten\_judge@yahoo.co.id$ 

#### **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Banten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Banten. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, 9 Juli 2018 Sekretaris,

Sudiyanto, S.H., M.H

## DAFTAR ISI

Kat	a Pengantar	i
Daf	tar Isi	ii
Per	nyataan Tanggung Jawab	iii
Rin	gkasan	1
I.	Laporan Realisasi Anggaran	1
II.	Neraca	1
III.	Laporan Operasional	2
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	6
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	7
	A. Penjelasan Umum	7
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	36
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI.	Lampiran dan Daftar	47

## PENGADILAN TINGGI BANTEN



Jl. Raya Pandeglang KM. 6.6 Serang 42126 Telp. 0254 251385,250002, Fax 0254 250001

#### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Banten yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 9 Juli 2018 Sekretaris,

Sudiyanto, S.H., M.H NIP 19691130 199203 1 001

#### RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Banten semester I Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

#### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.820.000 atau mencapai 23,50 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp12.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2018 adalah sebesar Rp76.073.470 atau mencapai 30,04 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp253.276.000.

#### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2018. Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp27.822.580 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp27.822.580; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.000.000 dan Rp22.822.580.

#### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode

sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp2.820.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp72.986.115 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp70.166.115. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.031.540 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp69.134.575.

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp15.236.100 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp69.134.575 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp76.721.055 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp22.822.580.

#### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## PENGADILAN TINGGI BANTEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

LIDALAN	CATATANI	30 JUNI 2018			TA 2016
URAIAN	CATATAN	ANGGARAN	REALISASI	% thd Angg	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	12,000,000	2,820,000	23.50	425,000
JUMLAH PENDAPATAN		12,000,000	2,820,000	23.50	425,000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0.00	-
Belanja Barang	B.4	253,276,000	76,073,470	30.04	56,783,350
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		253,276,000	76,073,470	30.04	56,783,350

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

#### PENGADILAN TINGGI BANTEN NERACA PER 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

(Dalam Rupic				
URAIAN	CATATAN	2017	2016	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	5,000,000	-	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-	
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-	
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-	
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-	
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9			
Persediaan	C.10	22,822,500	15,236,100	
Jumlah Aset Lancar		27,822,500	15,236,100	
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan TP/TGR	C.11	-	_	
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	_		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	_	
Jumlah Piutang Jangka Panjang	1	-	-	
ACCT TITAD				
ASET TETAP Tanah	C.14			
Peralatan dan Mesin	C.14 C.15	-	-	
Gedung dan Bangunan	C.15	-	-	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.10 C.17			
Aset Tetap Lainnya	C.17			
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	_	_	
Jumlah Aset Tetap	0.20	-	-	
ASET LAINNYA				
Aset Tidak Berwujud	C.21			
Aset Lain-Lain	C.21 C.22	_	_	
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22 C.23	_	_	
Jumlah Aset Lainnya	C.23		-	
JUMLAH ASET		27,822,500	15,236,100	
JOHILLI NOCI		27,022,300	13,230,100	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	C.24	5,000,000	-	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-	
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-	
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27		-	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5,000,000	-	
JUMLAH KEWAJIBAN		5,000,000	-	
EKUITAS				
Ekuitas	C.28	22,822,580	15,236,100	
JUMLAH EKUITAS		22,822,580	15,236,100	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27,822,580	15,236,100	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

#### III. LAPORAN OPERASIONAL

## PENGADILAN TINGGI BANTEN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2,820,000	425,000
JUMLAH PENDAPATAN		2,820,000	425,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	27,065,395	27,043,990
Beban Barang dan Jasa	D.4	12,740,720	11,073,460
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	33,180,000	5,370,000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		72,986,115	43,487,450
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(70,166,115)	(43,062,450)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		1,197,650	6,106,430
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		166,110	42,790
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1,031,540	6,063,640
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(69,134,575)	(36,998,810)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(69,134,575)	(36,998,810)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## PENGADILAN TINGGI BANTEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	15,236,100	8,359,630
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(69,134,575)	(122,143,050)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI	E.3		
EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	_	_
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	L.J.1		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		•	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	76,721,055	129,019,790
EKUITAS AKHIR	E.5	22,822,580	15,236,370

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

#### V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### A.1. Dasar Hukum

### Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintahan nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang perubahan kedua dan PP nomor 45 tahun 2013 mengenai perubahan ketiga atas keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaannomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan

- Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-42/PB/2012 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-222/PB/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

### A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Banten

Profil dan Kebijakan Teknis Tahun 2018 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2019 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten.

Visi Mahkamah Agung adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam

melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Misi Mahkamah Agung:

- 1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Tinggi Banten adalah Visi Pengadilan Tinggi Banten adalah TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG AGUNG yang bertujuan agar Pengadilan Tinggi Banten menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tinggi Banten adalah Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi / Tipikor Banten menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Banten;
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan di Pengadilan Tinggi Banten;

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut

- 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
- Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Banten melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
- 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
- 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
- 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
- 7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- 8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

#### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Banten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data. pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

#### A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya

pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Dasar Pengukuran

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tinggi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## Kebijakan Akuntansi

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan

dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan yang merupakan entitas pelaporan Keuangan Disamping Pengadilan Tinggi Banten. itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan sehat di lingkungan yang pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut:

## Pendapatan-LRA

#### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- dilaksanakan Akuntansi pendapatan-LRA berdasarkan bruto. yaitu dengan azas membukukan tidak penerimaan bruto, dan jumlah (setelah mencatat nettonya dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## Pendapatan-LO

#### (2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan dan tidak penerimaan bruto, mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### Belanja (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Beban (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah

timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas	Uraian	Penyisihan
Piutang		
Lancar	Belum dilakukan pelunasan	0.5%
Barrear	s.d. tanggal jatuh tempo	0.070
	Satu bulan terhitung sejak	
Kurang	tanggal Surat Tagihan	10%
Lancar	Pertama tidak dilakukan	1070
	pelunasan	
	Satu bulan terhitung sejak	
Diragukan	tanggal Surat Tagihan Kedua	50%
21108011011	tidak dilakukan pelunasan	0070
	1. Satu bulan terhitung sejak	
	tanggal Surat Tagihan Ketiga	
	tidak dilakukan pelunasan	
Macet	2. Piutang telah diserahkan	100%
	kepada Panitia Urusan	
	Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

## Penyusutan Aset Tetap

#### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset
   Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa
   memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### Aset Lainnya e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.
   Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran,	20

Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

 Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Banten telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

	201	2018		
Uraian	ANGGARAN	ANGGARAN		
	AWAL	SETELAH REVISI		
Pendapatan				
Pendapatan Jasa	0	-		
Pendapatan Lain-lain	12,000,000	12,000,000		
Jumlah Pendapatan	12,000,000	12,000,000		
Belanja				
Belanja Pegawai	0	-		
Belanja Barang	253,276,000	253,276,000		
Belanja Modal	0	-		
Belanja Bantuan Sosial	0	-		
Jumlah Belanja	253,276,000	253,276,000		

Realisasi Pendapatan Rp2.820.000

#### **B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp2.820.000 atau mencapai 23,50 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000. Pendapatan Pengadilan Tinggi Banten terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

	2018			
Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.	
Pendapatan Jasa	-	-		
Pendapatan PNBP Lainnya	12,000,000	2,820,000	23.50%	
Jumlah	12,000,000	2,820,000	23.50%	

Tidak ada Realisasi Pendapatan Jasa pada TA 2018. Pendapatan PNBP lainnya pada pengadilan Tinggi Banten pada Semester I TA 2018 mengalami penurunan sebesar 563,53 persen dari tahun anggaran 2017 sebab tahun ini lebih banyak advokat yang diambil sumpah.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

· ·	<b>-</b>		
URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	•	
Pendapatan PNBP Lain	2,820,000	425,000	563.53
Jumlah	2,820,000	425,000	563.53

## Realisasi

Belanja Negara

Rp76.073.470

#### B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester I TA 2018 adalah sebesar Rp76.073.470 atau 30,04 persen dari anggaran belanja sebesar Rp253.276.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018

		2018	
Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	253,276,000	76,073,470	30.04
Belanja Modal	1	-	-
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja Kotor	253,276,000	76,073,470	30.04
Pengembalian		ı	ì
Jumlah	253,276,000	76,073,470	30.04

Dibandingkan dengan Semester I TA 2017, Realisasi Belanja Semester I TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 33,97 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- 1. Bertambahnya pagu anggaran di tahun 2018,
- 2. Adanya anggaran Perjalanan dinas untuk Pembinaan dan Pengawasan yang sudah direalisasikan.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	•	•
Belanja Barang	76,073,470	56,783,350	33.97
Belanja Modal	-	-	•
Belanja Bantuan Sosial			
Jumlah	76,073,470	56,783,350	33.97

## Belanja Pegawai Rp0

#### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	•
Belanja Lembur	-	-	•
Jumlah Belanja Kotor	0	0	•
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	٠
Jumlah Belanja	0	0	-

## Belanja Barang Rp76.073.470

#### **B.4** Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp76.073.470 dan Rp56.783.350. Realisasi Belanja Barang semester I TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 33,97% dari Realisasi Belanja Barang semester 1 TA 2018. Hal ini antara lain disebabkan karena:

- 1. Bertambahnya pagu anggaran di tahun 2018.
- 2. Adanya anggaran Perjalanan dinas untuk Pembinaan dan Pengawasan yang sudah direalisasikan.

#### Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	7,506,020	9,873,460	(23.98)
Belanja Barang Non Operasional	5,234,700	1,200,000	336.23
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	33,180,000	5,370,000	517.88
Belanja Barang Persediaan	30,152,750	40,339,890	(25.25)
Jumlah Belanja Kotor	76,073,470	56,783,350	33.97
Pengembalian Belanja	-		
Jumlah Belanja	76,073,470	56,783,350	33.97

## Belanja Modal Rp0

#### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester 1 TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	0.00

#### B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin semester i TA 2018 adalah sebesar Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Bel. Modal Peralatan Mesin			
Jumlah Belanja	0	0	0.00

#### B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal semester 1 TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Bel. Modal Gedung Bangunan			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

#### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp5.000.000

#### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018 dan 2017

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang Tunai	3,256,500	510,450
Rekening bank	-	-
Kuitansi	1,743,500	2,489,590
Pembulatan	-	(40)
Jumlah	5,000,000	3,000,000

Tagihan TP/TGR

Rp0

## Bagian Lancar C.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2018 dan 20177 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2018 dan 2017

No	Nama	Tahun 2018	Tahun 2017
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Lancar Rp 0

#### C.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masingmasing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2018 dan 2017

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	•	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	ı	0.50%	ı
Kurang Lancar	•	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	•	0.50%	ı
Kurang Lancar	•	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp0

#### C.4 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2018 dan 2017

<b>Jenis</b>	Tahun 2018	Tahun 2017
Jumlah	-	-

#### C.5 Persediaan

Persediaan Rp22.822.580

Nilai Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp22.822.580 dan Rp15.236.100.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017

Jenis	Tahun 2018	Tahun 2017
Barang Konsumsi	22,822,580	15,236,100
Bahan untuk Pemeliharaan	•	-
Suku Cadang		-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	22,822,580	15,236,100

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan No. W29.U/1502/PL.03/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.

Tagihan TP/TGR Rp0

## C.6 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2018 dan 2017 masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut.

## Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2018 dan 2017

No	Debitur	Tahun 2018	Tahun 2017
	Jumlah	-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0

## C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masingmasing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2018

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Panjang	Penyisihan	Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	ı	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah Rp0

### C.8 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Tinggi Banten per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2018	0

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2018

No	Luas	Atas Nama	Lokasi	Peruntukan	Nilai
		Jumlah			-

Peralatan dan Mesin Rp0

#### C.9 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	0
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	0
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018	0
Nilai Buku per 30 Juni 2018	0

# Gedung dan Bangunan <sub>Rp0</sub>

## C.10 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



# Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp0

## C.11 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	-
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	-
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	-
Saldo per 30 Juni 2018	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018	_
Nilai Buku per 30 Juni 2018	-

# Aset Tetap Lainnya Rp0

### C.12 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap selama Tahun 2017, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	
Nilai Buku per 30 Juni 2018	0

# Konstruksi Dalam

Pengerjaan Rp0

## C.13 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

# Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0

## C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain

untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

#### C.15 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

## C.16 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Tinggi Banten per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Total	-	

## Ekuitas Rp22.822.580

#### C.17 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masingmasing sebesar Rp22.822.580 dan Rp15.236.100. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

# D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

## D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp2.820.000 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp2.820.000 dan Rp425.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2018 dan 2017

URAIAN	<b>Tahun 2018</b>	Tahun 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan PNBP Lainnya	2,820,000	425,000	563.53
Jumlah	2,820,000	425,000	563.53

Pendapatan Lain-Lain merupakan pendapatan dari hak redaksi yang ada di bagian perdata dan pelantikan advokat.

# Beban Pegawai Rp0

#### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam barang bentuk uang maupun yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	Tahun 2018	tahun 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	0	0
Beban Tunjangan-tunjangan	0	0	0
Beban Honorarium dan Vakasi	•	0	0
Beban Lembur	•	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban Persediaan Rp27.065.395

#### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Semester I Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp27.065.395 dan Rp27.043.990. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2018 dan 2017

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	27,065,395	27,043,990	0
Beban persediaan pita cukai, materai dan leges		0	0
Beban Persediaan Lainnya	•	0	0
Jumlah	27,065,395	27,043,990	0

Beban Barang dan Jasa Rp12.740.720

## D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp12.740.720 dan Rp11.073.460. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2018	Tahun 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,506,020	9,873,460	(23.98)
Beban Bahan	5,234,700	1,200,000	336.23
Jumlah	12,740,720	11,073,460	15.06

# Beban Pemeliharaan Rp0

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan semester I Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester I Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2018	Tahun 2017	NAIK (TURUN) %
Jumlah	0	0	0.00

Beban Perjalanan Dinas Rp33.180.000

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp33.180.000 dan Rp5.370.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2018	Tahun 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	33,180,000	4,070,000	715.23
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,300,000	0.00
Jumlah	33,180,000	4,070,000	715.23

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

#### D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk semester 1 Tahun 2018 dan 2017 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk semester 1 tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2018 dan 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun 2018	Tahun 2017	NAIK (TURUN) %
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Jumlah Amortisasi			-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	)	-	-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

## D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk semester I Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

## Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2018	Tahun 2017	NAIK (TURUN) %
Jumlah	0	0	0.00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp1.031.540

### **D.9 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan 2017

URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	1,197,650	6,106,430	100.00
beban Penyesuaian nilai persediaan	166,110	42,790	(100.00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1,031,540	6,063,640	100.00

<sup>\*)</sup> Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

# PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp.15.236.100

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp15.236.100 dan Rp8.359.360.

Surplus / (Defisit) LO (Rp.69.134.57 5)

## E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp69.134.575 dan Rp122.143.050. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

# Penyesuaian Nilai Aset Rp0

## E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

# Koreksi Nilai Persediaan Rp0

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan sampai dengan 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Jumlah	-

#### Selisih

## E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

# Revaluasi Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masingmasing sebesar Rp0 dan Rp0.

# Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

### E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap gedungdan bangunan yang merupakan peralatan dan mesin.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

## Koreksi Lain-Lain Rp0

#### E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Jumlah	-

## Transaksi

#### E.4 Transaksi Antar Entitas

Antar Entitas Rp.76.721.055 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp76.721.005 dan Rp120.019.790. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	76,073,470
Diterima dari Entitas Lain	(2,820,000)
Transfer Masuk	56,923,702
Transfer Keluar	(53,456,117)
Pengesahan Hibah Langsung	•
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	76,721,055

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

# E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, DKEL sebesar Rp76.073.470 sedangkan DDEL sebesar (Rp2.820.000).

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp56.923.702 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
	Buku Register	Dirjen Badilum	56,923,702
	Jumlah		56,923,702

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp 53.456.117.

# E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah	
			Rp	-
			Rp	-
Tota	Total Pengesahan		Rp	-
Peng	Pengesahan Pengembalian Hibah		Rp	-
	Jumlah		Rp	-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2018 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir Rp22.822.580

#### E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp22.822.580 dan Rp15.236.100.

#### F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

# F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal neraca.

#### F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Rekening Pemerintah Yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Banten adalah:

- BRI Cabang Serang A/C 0084-01-001902-30-8 a.n BPG 020 Pengadilan Tinggi Banten 663399 QQ yang digunakan sebagai penampung DIPA Badilum dengan saldo akhir per 30 Juni 2018 sebesar Rp0.
- BNI Cabang Serang A/C 0151427938 a.n RPL 020 PT BANTEN UNTUK PDT BIAYA PERKARA Yang digunakan sebagai penampung biaya perkara/Titipan pihak ke-3 dengan saldo akhir per 30 Juni 2018 sebesar Rp4.950.000.